

ANALISA STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PURBALINGGA

Dewi Wijiyanti^{1*}, Simin²

^{1,2} Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*ra.wijiyanti@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Pada tahun 2020, Purbalingga menjadi salah satu zona merah akibat pandemi COVID-19. Data dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengidentifikasi rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan lini 2. Jumlah pasien positif COVID-19 di Purbalingga terus meningkat. Pemerintah Purbalingga berupaya keras untuk mencegah penyebaran wabah dengan himbauan seperti menjaga jarak sosial, menggunakan masker, serta praktik higienis lainnya. Namun, banyak masyarakat Purbalingga yang tidak mematuhi himbauan tersebut, sehingga jumlah pasien positif terus bertambah. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di kabupaten tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Purbalingga. Metode kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara kepada informan yang relevan dari POLRES Purbalingga dan BPBD Purbalingga. Hasil analisis menunjukkan bahwa POLRES dan BPBD Purbalingga memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka secara aktif mengarahkan perhatian masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menegakkan disiplin masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk respons yang terkoordinasi. Langkah konkret seperti kampanye 5M, penegakan jarak sosial, dan dukungan dalam program vaksinasi menunjukkan komitmen POLRES dan BPBD Purbalingga dalam mengurangi risiko penularan dan melindungi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, COVID-19, POLRES Purbalingga, BPBD Purbalingga, Keterlibatan Stakeholder.

Abstract

In 2020, Purbalingga became one of the red zones due to the COVID-19 pandemic. Data from the dr. R. Goeteng Taroenadibrata Regional Hospital identified it as a second-line referral hospital. The number of COVID-19 positive patients in Purbalingga continued to rise. The Purbalingga government made strenuous efforts to prevent the spread of the outbreak, issuing advisories such as maintaining social distance, using masks, and promoting other hygienic practices. However, many residents of Purbalingga did not adhere to these advisories, leading to a continuous increase in the number of positive cases. This situation raised questions about the role and involvement of stakeholders in implementing COVID-19 mitigation policies in the regency. This research aims to describe the roles and involvement of stakeholders in implementing COVID-19 mitigation policies in Purbalingga. A qualitative method was employed by conducting interviews with relevant informants from the Purbalingga Police Department (POLRES) and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Purbalingga. The analysis results indicated that the Purbalingga Police Department and BPBD play strategic roles in handling the COVID-19 pandemic. They actively direct public attention towards adhering to health protocols, enforce community discipline, and collaborate with various agencies for a coordinated response. Concrete steps such as the 5M campaign, enforcing social distancing, and supporting vaccination programs demonstrate the

commitment of the Purbalingga Police Department and BPBD in reducing transmission risks and protecting the community.

Keywords: Policy Implementation, COVID-19, Purbalingga Police Department (POLRES), Purbalingga Regional Disaster Management Agency (BPBD), Stakeholder Involvement.

PENDAHULUAN

Pada Januari 2020, penyakit Corona Virus Disease-19 (COVID-19) telah menjangkiti lebih dari 2.245.872 orang di seluruh dunia dengan lebih dari 152.000 kematian. Respons pemerintahan di berbagai negara dalam menghadapi pandemi ini berbeda-beda. Contohnya, pemerintah China merespons dengan mengubah fasilitas-fasilitas menjadi tempat perawatan, melakukan tes massal, dan mengisolasi kota. Di Korea Selatan, pendeteksian dini dilakukan dengan tes cepat untuk meminimalkan penyebaran. Virus Corona ini berasal dari hewan dan menginfeksi manusia, yang kemudian berkembang menjadi pneumonia.

Dalam menghadapi pandemi ini, tatalaksana COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak dan panduan yang mudah dimengerti. Pemerintah Indonesia juga merespons dengan langkah-langkah seperti memakai masker, menjaga jarak, dan kampanye cuci tangan. Namun, perubahan perilaku masyarakat tidaklah mudah. Kebijakan juga diambil, seperti pembatasan sosial berskala besar, tapi adaptasinya tidak selalu mulus.

Purbalingga menjadi zona merah pada 2020, dan pasien COVID-19 terus bertambah. Meskipun pemerintah berupaya dengan himbauan dan upaya preventif, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi. Grafik menunjukkan pergerakan pasien COVID-19 di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, dan kurangnya keterlibatan stakeholder dalam penanganan terlihat dalam peningkatan kasus. Dengan latar belakang ini, pertanyaan dan tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Purbalingga.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kebijakan

Kebijakan, dalam konteks umum, merujuk pada langkah-langkah atau panduan perilaku yang diadopsi oleh individu, kelompok, atau lembaga, seperti pejabat pemerintah, untuk mengatasi masalah yang ada. Pandangan Noeng Muhadjir menggambarkan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah sosial yang diarahkan pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kebijakan diharapkan memenuhi empat aspek kunci, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat, pemberian keadilan, partisipasi aktif masyarakat, dan pemastian perkembangan berkelanjutan. Dalam pandangan ini, implementasi kebijakan harus menitikberatkan pada tujuan ini dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut (Muhadjir, 2000).

Sekaligus, definisi kebijakan dikaitkan dengan pengaturan dan tata kelola organisasi, dengan aspek formal yang diterima bersama oleh pemerintah atau lembaga terkait, dan hal ini mendorong mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini mengartikulasikan bahwa kebijakan tidak hanya sekadar petunjuk, tetapi juga peraturan yang memberikan arah tindakan dan keputusan, yang menjadi panduan bagi pelaku dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan menjadi alat penting untuk mengatasi tindakan yang muncul dalam konteks organisasi serta menentukan arah pengambilan keputusan (Muhadjir, 2000).

Lanjutnya, Wehrich dan Koontz menggarisbawahi peran kebijakan sebagai alat untuk mengatur inisiatif dalam kerangka keterbatasan yang ada. Kebijakan memegang peran penting dalam menunjukkan kebebasan dan merfleksikan posisi serta kekuasaan dalam struktur organisasi. Kebijakan dianggap sebagai rencana, yang dapat berupa pernyataan atau pengertian, yang memberikan arah pikiran dalam pengambilan keputusan. Meskipun

tidak semua kebijakan diekspresikan dalam bentuk pernyataan, esensi mereka dapat disimpulkan dari tindakan manajer. Koontz dan Weihrich juga menekankan bahwa kebijakan berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, yang beroperasi dalam batasan yang telah ditetapkan (Koontz & Weihrich, 1992).

Pendekatan konseptual ini dibagi oleh Muhadjir menjadi dua jenis kebijakan: kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif melibatkan pemilihan alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sementara itu, kebijakan implementatif berfokus pada keputusan yang melibatkan upaya untuk menjalankan kebijakan substantif tersebut (Muhadjir, 2003).

Secara praktis, kebijakan muncul dalam bentuk undang-undang, petunjuk, dan program dalam konteks suatu negara. Kebijakan dianggap sebagai serangkaian tindakan yang dirancang oleh badan atau pemerintah dengan tujuan tertentu, dan tindakan ini diikuti dan dijalankan oleh individu atau kelompok untuk menangani situasi yang spesifik. Secara keseluruhan, berdasarkan kerangka pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang memberikan panduan umum dalam pemecahan masalah. Kebijakan mengemban peran sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, dan tindakan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Muhadjir, 2000; Muhadjir, 2003; Weihrich & Koontz, 1992; Koontz & Weihrich, 1992).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan dari berbagai perspektif. A. Hoogerwert mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan unsur penting dalam ranah politik dan dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu. Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah interaksi antara unit pemerintah dan lingkungannya. Pendapat Gerston (1992) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup upaya pejabat pemerintah pada berbagai tingkatan untuk menangani masalah-masalah publik. Menurutnya, proses penetapan kebijakan melibatkan lima tahapan, termasuk identifikasi isu, pengembangan proposal, advokasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, Dunn mengartikan kebijakan publik sebagai pola kompleks dari pilihan kolektif yang dilakukan oleh institusi pemerintah.

Dye menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan pemerintah, tetapi juga ketidaktindakan pemerintah yang memiliki dampak pada masyarakat. Kebijakan publik dapat merujuk pada keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat. Ini melibatkan pemahaman terhadap masalah, penyebabnya, serta dampak dan konsekuensi dari tindakan atau ketidak-tindakan pemerintah.

Karakteristik-karakteristik kebijakan publik meliputi tujuan yang dituju untuk memecahkan masalah masyarakat, tindakan konkret yang diambil, peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik, serta kadangkala berwujud ketetapan negatif yang melarang atau menghindari tindakan tertentu. Secara keseluruhan, kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat secara luas, memiliki dimensi strategis atau pandangan umum, dan dibentuk oleh pihak berwenang dalam pemerintahan.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah instrumen yang mencakup ranah pemerintah dan tata kelola sumber daya publik. Ini mencakup keputusan dan tindakan yang mengatur pengelolaan serta distribusi sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan publik, seperti rakyat, penduduk, atau warga negara. Kebijakan adalah hasil dari interaksi gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang merefleksikan sistem politik suatu negara.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973) yang dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan publik adalah keputusan yang konsisten dan diulang yang memengaruhi perilaku pembuat kebijakan serta pelaksanaan dan pematuhan terhadap keputusan tersebut. Sementara menurut Carl Friedrich (1969), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan

atau usulan yang diarahkan untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan tertentu, baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah.

Definisi Bridgman dan Davis (2005) yang dikutip dalam Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya mencakup pilihan tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Ini melibatkan dimensi tujuan pencapaian publik, tindakan yang sah secara hukum, dan asumsi-asumsi tentang sebab dan akibat.

Dalam pengertian ini, kebijakan publik mencerminkan upaya pemerintah untuk menghasilkan hasil tertentu dengan mengambil tindakan atau keputusan yang dapat legal, didukung oleh teori atau hipotesis, dan mengarahkan perilaku masyarakat atau pelaksanaan pemerintah. Kebijakan publik juga dapat bersifat positif dengan melibatkan tindakan pemerintah yang aktif atau bersifat negatif dengan tidak melakukan tindakan yang diperlukan dalam suatu konteks. Selain itu, kebijakan publik sering kali berbasis hukum dan berfungsi sebagai instrumen perintah dalam mengatur dan mengarahkan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi, yang berasal dari bahasa Inggris "implement," merujuk pada tindakan untuk mewujudkan dampak atau akibat tertentu melalui penyediaan sarana. Implementasi dapat berupa pengaturan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, atau kebijakan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam konteks kenegaraan (Sobirin, 2017). Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahap penting yang menjamin pencapaian tujuan kebijakan tersebut (Andhi, 2021). Namun, implementasi seringkali memerlukan sumber daya yang memadai, sebagai faktor penting yang harus ada dalam pelaksanaannya (Siswanto, 2009).

Kebijakan publik, secara etimologis, mengacu pada istilah bahasa Inggris "policy." Walaupun seringkali dianggap setara dengan istilah "kebijaksanaan," sebenarnya istilah ini memiliki perbedaan. Kata "kebijaksanaan" berasal dari kata "wisdom" dalam bahasa Inggris, yang lebih menunjukkan pertimbangan mendalam. Sebaliknya, "kebijakan" mencakup peraturan dan konteks politik (Marysol et.al, 2020). Kebijakan adalah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang yang ada (Saputra, 2021).

Kebijakan membawa unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Meskipun mungkin ada hambatan, tetapi kebijakan harus mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga harus selaras dengan nilai-nilai dan praktik sosial dalam masyarakat. Ketidakselarasan ini dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, suatu kebijakan sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Hyun, 2015).

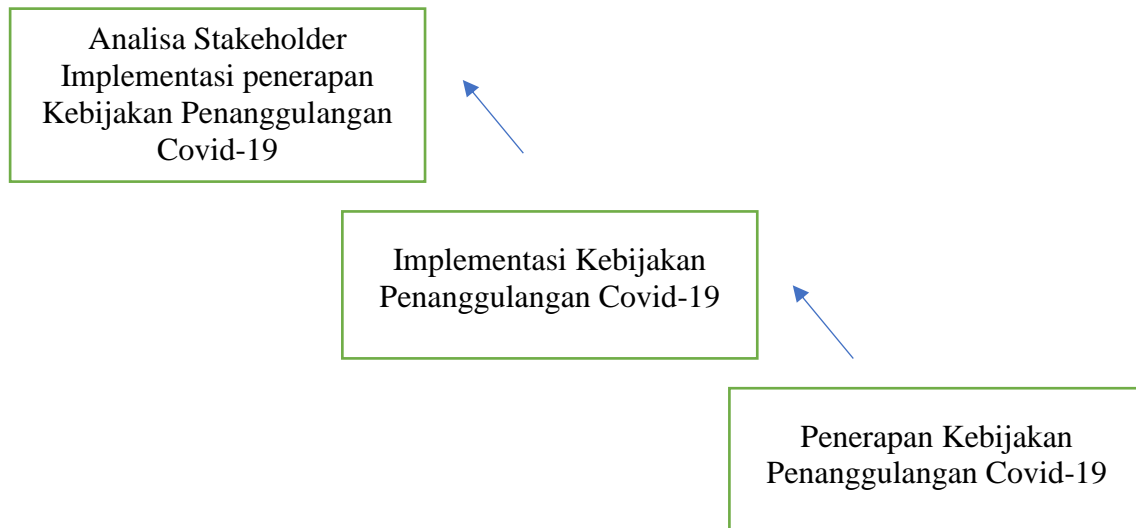
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta, baik individu maupun kelompok, dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dyah dan Arif, 2014). Ini adalah tahap kritis dalam proses kebijakan publik, karena menentukan apakah tujuan kebijakan akan tercapai atau tidak. Implementasi kebijakan dilihat sebagai alat administrasi publik yang melibatkan aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya yang dikoordinasikan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan (Jean, 2020).

Implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn, melibatkan tindakan organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Implementasi ini mencakup upaya mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam periode tertentu dan melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditargetkan oleh keputusan kebijakan (Ruairí, 2000).

Pengkategorian kebijakan publik dapat bervariasi. Model-model implementasi kebijakan pemerintah, seperti model "top-down approach" oleh Hogwood dan Gunn, menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, termasuk kondisi eksternal, sumber daya, komunikasi, dan dukungan terhadap tujuan (Sobirin, 2017). Kategori kebijakan publik berdasarkan James E. Anderson mencakup kebijakan

substantif dan prosedural, distributif dan regulatori, serta material dan simbolis, serta pengelompokan berdasarkan barang umum dan barang privat (Gary, 2005).

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan dampak atau akibat yang diharapkan, dengan sumber daya dan koordinasi yang memadai, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut. Dalam penerapan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Purbalingga. Kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga, dengan lokasi penelitian di Polres Purbalingga dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga. Tujuan pemilihan lokasi ini adalah karena Kabupaten Purbalingga memiliki dampak yang cukup besar dalam penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Sasaran penelitian adalah Kepala Polres Purbalingga dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, yang merupakan pelaku utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan fakta di lapangan dengan teori dan memberikan solusi terhadap permasalahan. Data kualitatif dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi pustaka. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang memiliki informasi sesuai dengan tema penelitian.

Fokus penelitian ini adalah peran stakeholder dalam kebijakan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini membatasi studi pada tiga aspek utama: pelibatan dalam pencegahan, penanggulangan, dan pengawasan. Delapan informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 dipilih sebagai subjek penelitian.

Data yang diperoleh berasal dari sumber primer (wawancara dengan informan) dan sumber sekunder (dokumen dan literatur terkait). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif, yang mencari tema dan hipotesis yang muncul dari data.

PEMBAHASAN

1. Peran POLRES pada Penanggulangan COVID-19 di Purbalingga

Selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Purbalingga, peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang diwakili oleh Polisi Resor Purbalingga (POLRES Purbalingga) memiliki signifikansi besar dalam mengatasi situasi tersebut. POLRES fokus pada upaya

pengecahan penyebaran virus dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

POLRES Kabupaten Purbalingga menerapkan kampanye 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengatur mobilitas) sebagai tindakan konkret untuk mencegah penyebaran virus. Kampanye ini disertai dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan protokol ini. POLRES juga memantau ruang publik seperti pasar dan transportasi umum untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Mereka bekerja sama dengan instansi lain, termasuk pemerintah daerah dan dinas kesehatan, dalam koordinasi penanggulangan COVID-19 untuk respons yang terstruktur.

POLRES Purbalingga juga aktif dalam mempromosikan social distancing melalui kampanye intensif, pemasangan spanduk edukatif, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Mereka juga melakukan pengawasan dan penegakan kebijakan social distancing di tempat-tempat publik yang rentan terhadap kerumunan. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan instansi kesehatan, menjadi landasan dalam melaksanakan kebijakan social distancing. POLRES Purbalingga berupaya menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap praktik ini, sehingga membantu mengurangi risiko penyebaran virus.

Secara komprehensif, POLRES Purbalingga berperan sebagai pengawas, penyedia informasi, dan pelaku dalam upaya mitigasi penyebaran virus. Melalui berbagai kampanye, pengawasan aktif, dan kerja sama dengan instansi terkait, mereka berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak negatif pandemi.

2. Peran BPBD pada Penanggulangan COVID-19 di Purbalingga

Pandemi COVID-19 di Kabupaten Purbalingga telah menegaskan peran penting yang dimainkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD tidak hanya terbatas pada tanggapan terhadap bencana alam, tetapi juga harus mengadaptasi fungsinya untuk mengatasi kompleksitas tantangan sosial dan kemanusiaan yang muncul akibat pandemi.

Muhsoni (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2022) menjelaskan bahwa BPBD Purbalingga telah berperan krusial dalam menerapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 dari tingkat nasional hingga desa. Ini mencakup langkah-langkah seperti penanganan kasus positif, implementasi protokol kesehatan di tempat umum, pengaturan mobilitas, dan edukasi kepada masyarakat.

BPBD Purbalingga memiliki peran koordinatif di berbagai tingkat. Pada tingkat nasional, mereka memastikan informasi dan pedoman dari pemerintah pusat disampaikan dengan efektif ke tingkat yang lebih rendah. Pada tingkat lokal, BPBD Purbalingga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan di tingkat desa.

Di tingkat desa, BPBD Purbalingga membentuk satuan tugas COVID-19 yang bertugas melaksanakan langkah-langkah respons, memantau situasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. BPBD memainkan peran integral dalam mengoordinasikan instansi terkait dalam penanganan pandemi.

Dalam konteks ini, BPBD Purbalingga juga fokus pada dua aspek penting. Mereka melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, WFH, dan pelaksanaan PSBB. Selain itu, mereka juga terlibat dalam distribusi bantuan sosial (bansos) kepada kelompok terdampak ekonomi.

BPBD Purbalingga juga memainkan peran dalam kegiatan vaksinasi. Mereka mendukung pelaksanaan vaksinasi pada berbagai tahapan, dari tenaga medis hingga masyarakat umum. BPBD berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator dalam upaya vaksinasi.

Seluruh upaya ini dilakukan dalam kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan masyarakat. BPBD juga memperhatikan aspek kesejahteraan mental dan sosial masyarakat, selain aspek fisik.

Dengan cara ini, BPBD Purbalingga tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko penularan virus, tetapi juga berusaha untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi. Peran

komprehensif ini mencerminkan transformasi signifikan dalam peran BPBD dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, BPBD telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan kolaborasi yang penting dalam menghadapi tantangan multidimensi dari pandemi.

3. Pelibatan Stakeholder pada Kebijakan Penanggulangan Pandemi COVID-19

Analisis Pelibatan Stakeholder (POLRI dan BPBD) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Purbalingga berada dalam konteks pemberdayaan aktor-aktor penyelenggara ketertiban dan mitigasi bencana, teks di atas menggambarkan peran yang signifikan yang diperankan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons pandemi COVID-19 yang melanda Kabupaten Purbalingga. Dalam analisis yang lebih mendalam, beberapa aspek penting dapat ditegaskan.

Pelibatan POLRI:

- a. Peran Strategis dalam Implementasi Protokol Kesehatan: POLRI memainkan peran vital dalam mengarahkan perhatian dan tindakan masyarakat terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Langkah-langkah konkrit dilakukan, termasuk kampanye 5M dan sosialisasi mendalam, guna memastikan penerapan praktik seperti penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan mengatur mobilitas.
- b. Penegakan Protokol Kesehatan dan Kedisiplinan Masyarakat: POLRI menunjukkan komitmen dalam penegakan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pemantauan dan pengawasan yang cermat terhadap tempat-tempat umum, seperti pasar dan sarana transportasi, mengindikasikan peran mereka dalam memastikan kesesuaian implementasi protokol serta penekanan pada kesadaran dan tanggung jawab kolektif.
- c. Kerjasama Lintas Instansi dalam Respons Terkoordinasi: Partisipasi POLRI dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan mengilustrasikan peran integral dalam upaya menyelaraskan dan mengkoordinasikan respons multi-stakeholder. Fungsi ini relevan untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dan responsif terhadap dinamika pandemi di tingkat lokal.
- d. Implementasi Kebijakan Social Distancing: POLRI memainkan peran aktif dalam mendorong penerapan social distancing melalui kampanye, pengawasan tempat-tempat publik yang rawan kerumunan, dan dukungan terhadap regulasi kapasitas tempat umum. Ini mewakili kontribusi substantif dalam pengurangan risiko penularan melalui pengendalian interaksi fisik.
- e. Peran dalam Program Vaksinasi: Keterlibatan POLRI dalam pelaksanaan dan koordinasi program vaksinasi menunjukkan komitmen mereka terhadap upaya mitigasi. Partisipasi dalam vaksinasi juga mencerminkan kontribusi mereka dalam melindungi masyarakat dan mencegah penyebaran virus melalui kekebalan komunitas.

Pelibatan BPBD:

- a. Transformasi Peran dalam Konteks Pandemi: BPBD memperlihatkan adaptasi peran yang substansial, melebihi tanggung jawab tradisional dalam penanggulangan bencana alam. Mereka berhasil meluaskan fungsinya untuk merespons multidimensionalitas pandemi COVID-19, termasuk respons sosial dan kemanusiaan.
- b. Koordinasi dan Integrasi Kebijakan: BPBD memainkan peran sentral dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat lokal. Ini mencerminkan fungsi koordinatif mereka untuk menyelaraskan arahan dan informasi dari tingkat nasional hingga tingkat desa.
- c. Diversifikasi Fokus Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat: Selain fokus pada aspek fisik, BPBD juga memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan mental dan sosial. Dukungan psikososial dan edukasi yang diberikan menggambarkan peran humanis mereka dalam merespons kebutuhan masyarakat secara komprehensif.
- d. Pemberian Bantuan Sosial dan Kemanusiaan: Keterlibatan BPBD dalam pemberian bantuan sosial menegaskan dimensi empati dan responsif mereka terhadap konsekuensi

ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi. Tindakan ini membuktikan keterlibatan mereka dalam mitigasi dampak.

- e. Peran dalam Kampanye Vaksinasi: Peran yang dimainkan oleh BPBD dalam pelaksanaan vaksinasi, termasuk fasilitasi dan koordinasi, menandakan tanggapan yang serius terhadap prioritas vaksinasi. Ini juga menggambarkan upaya mereka dalam mencapai kekebalan komunitas yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang penting dan signifikan. Keduanya berperan dalam mengatasi situasi darurat yang diakibatkan oleh pandemi ini melalui pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi.

Peran POLRI:

1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan sebagai pengawas dan pelaksana dalam menjalankan berbagai upaya penanggulangan COVID-19. POLRI memiliki peran utama dalam menjaga disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. POLRI berfokus pada kampanye "5M" yang mencakup penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan mengatur mobilitas.
2. Melalui berbagai inisiatif kampanye dan edukasi, POLRI berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan. Mereka juga terlibat dalam pengawasan aktif terhadap ruang-ruang publik seperti pasar dan sarana transportasi umum untuk memastikan protokol diterapkan dengan tepat. Kerjasama dengan instansi terkait juga dijalankan untuk penegakan kebijakan, termasuk pemerintah daerah dan dinas kesehatan.
3. Melalui pelaksanaan kebijakan social distancing, POLRI berupaya mengurangi risiko penularan virus dengan cara mengedukasi masyarakat, mengawasi tempat-tempat publik yang berpotensi kerumunan, serta menjalin kerjasama lintas sektor untuk menjalankan kebijakan ini. Dengan implementasi berbagai strategi ini, POLRI memberikan kontribusi yang signifikan dalam mitigasi penyebaran COVID-19 dan melindungi kesehatan masyarakat.

Peran BPBD:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga memiliki peran yang integral dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Meskipun biasanya terkait dengan respons terhadap bencana alam, BPBD memainkan peran lebih luas dalam merespons dinamika sosial dan kemanusiaan yang muncul akibat pandemi ini.
2. BPBD Purbalingga memiliki peran koordinatif dalam menghubungkan kebijakan penanggulangan COVID-19 dari tingkat pusat hingga desa. Mereka menyelaraskan arahan nasional dengan implementasi di tingkat lokal melalui satuan tugas COVID-19 di tingkat desa. BPBD juga memfokuskan upayanya pada penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan, serta terlibat dalam distribusi bantuan sosial kepada kelompok terdampak ekonomi.
3. Salah satu aspek penting peran BPBD adalah pelaksanaan kegiatan vaksinasi. BPBD Purbalingga melaksanakan tiga tahapan vaksinasi dengan memfokuskan pada kelompok prioritas yang memiliki risiko tinggi terinfeksi. Mereka menjadi fasilitator dan koordinator dalam memastikan pelaksanaan vaksinasi yang efektif, dari penyediaan sarana dan prasarana hingga memastikan akses masyarakat ke vaksinasi.
4. Secara menyeluruh, peran BPBD Purbalingga mencerminkan transformasi dalam lingkup tanggung jawabnya, dari respons terhadap bencana alam menjadi penanganan pandemi yang kompleks. Melalui kolaborasi lintas-lembaga, edukasi, distribusi bantuan sosial, dan pelaksanaan vaksinasi, BPBD berperan penting dalam mengatasi tantangan multidimensi yang dihadirkan oleh pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhi Bahtiar dan Adis Imam Munandar. 2021. Stakeholder Analysis Pada Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 5, Nomor 1, April 2021
- Andi Baso. 2016. *Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan Masalah Sosial Imigran Gelap di Kota Makassar*. Makassar
- Budimanta, Arif, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito. 2008. *Corporate Sosial Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Dwi Susanto, dkk, Tim COVID-19 IDAI, *Protokol Tatalaksana Covid-19*, Edisi 1, April, 2020, hlm.1.
- Gary Shan Chi PAN. 2005. Information systems project abandonment: A stakeholder analysis. *International Journal of Information Management*, 2005 April, Volume 25, Issue 2, Pages 173-184 <http://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2004.12.003>
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Sosial Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Haroid Koontz Cyrill O'Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eighth Edition*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1992, hlm. 144.
- Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324, 2009, hlm. 79.
- Hyun Soon Park and Yun Hee Lee. 2015. Exploring a Process Model for Stakeholder Management. *Journal Public Relations*. Vol. 9
- Iswarno, Mubasysyir Hasanbasri dan Lutfan Lazuardi. 2013. Analisis Untuk Penerapan Kebijakan: Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Program Kesehatan Ibu Dan Anak di Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol. 02 No. 02
- Jean Davison, David Deeks and Lesley Bruce. 2020. Stakeholder Analysis as a Medium to Aid Change in Information System Reengineering Projects. *Systemics, Cybernetics And Informatics Volume 2 - Number 2*
- Karl Roberts, "Policing the Pandemic: Managing The Police Response To COVID-19 Coronavirus," in <https://www.blueline.ca/policing-the-pandemic-managing-the-police-response-to-COVID-19-coronavirus/>, diakses 19 Desember 2020, pukul 19.45 WIB.
- Keputusan Presiden Nomor. 12 Tahun 2020, 13 April 2020. Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Kusumedi, P dan Bisjoe, A.R.H. 2010. Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(3),179-193.
- Marysol Astrea Balane, Benjamin Palafox, Lia M Palileo-Villanueva, Martin McKee, Dina Balabanova. 2020. Enhancing the use of stakeholder analysis for policy implementation research: towards a novel framing and operationalised measures. *Global Health* 2020;5:e002661. doi:10.1136/bmjgh-2020-002661
- Mora Octavia. Artikel "Covid-19 Makin Ganas, Waspada Penularan Via Rongga Mulut", Saff pengajar Dep. Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta November 2020, hlm. 1
- Nina Hertiwi Putri. Artikel, komplikasi corona bisa muncul pada pasien positif covid-19. september 2021, "in <https://www.sehatq.com/artikel/komplikasi-corona-ini-bisa-muncul-pada-pasien-positif-covid-19>,
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000, hlm. 15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020, 31 Maret 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- R. Thomas Dye, *Horn Meter, Under Standing Public Police*, Pentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, Th, 1987, hlm.3.
- Roshiful Qolbi. 2020. Perencanaan Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Dalam Menangani Penyebaran *Covid-19* Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 9, Nomor 4, Desember 2020, hlm. 551-566
- Ruairí Brugha And Zsuzsa Varvasovszky. 2000. Stakeholder analysis: a review. *HEALTH POLICY AND PLANNING*; 15(3): 239–246
- Sri Indiarti. 2019. Analisis Stakeholders Dalam Kebijakan Program Dana Bergulir (PDB) Samisake Di Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, Volume 1, Nomor 1, Sepetmber 2019
- Thompson, R. 2011. Stakeholder Analysis. Winning Support For Your Projects. http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm.
- Umar Reza Saputra, 2021. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Melalui Pengembangan Industri. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik& Kebijakan Politik*. ISSN Print: 2685-7499.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.